

**TINJAUAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



SONIA RIANDA PUTRI
20233094

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

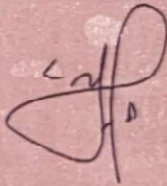
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Sonia Rianda Putri
NIM : 20233094
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

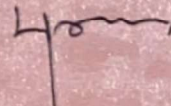
Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M
NIP.19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Abel Tasman, SE, MM
NIP.19810711 201012 1 003

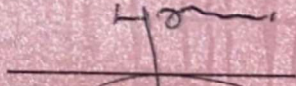
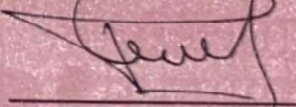

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJUAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Sonia Rianda Putri
NIM : 20233094
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas
Akhir Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	TandaTangan
1. Abel Tasman, SE, MM	(Ketua)	
2. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	
3. Erly Mulyani, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sonia Rianda Putri
Thn.Masuk/NIM : 2020/20233094
Tempat/Tgl.Lahir : Kasai/14 September 2001
ProgramStudi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kampung Kandang, Pauh Kamar, Kab. Padang Pariaman
JudulTugasAkhir : Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

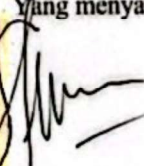
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,




Sonia Rianda Putri
NIM. 20233094

ABSTRAK

Sonia Rianda Putri : Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman

Pembimbing : Abel Tasman, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman, Penelitian ini dilakukan di sitem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman, Jl. Soekarno Hatta Toboh Palabab Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penerapan kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor ini tidak terjadi setiap tahunnya. Kebijakan ini dilakukan agar mendorong minat wajib pajak agar melakukan balik nama kendaraan bermotor. Namun dengan adanya kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi dan kesulitan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman dalam pengoptimalan kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan, Penghapusan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Assammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman** “. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Asrizal dan Ibunda Hermawati serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph,D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M.Se, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

6. Bapak Abel Tasman, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tugas Akhir, Kantor Samsat Padang Pariaman dan Pegawai- Pegawainya yang telah membantu saya dalam penelitian.
10. Sahabat seperjuangan” Trisya, Zilvany Dan Silvi” dan “Support Sytem” yang selalu mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teman Spesial Saya “Wigo Diagona Ilham” yang selalu memberi dukungan serta memberi semangat kepada saya

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermamfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2023

Sonia Rianda Putri
20233094

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Daerah.....	7
1. Pengertian Pajak daerah.....	7
2. Jenis Pajak daerah.....	7
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	9
B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	10
1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
2. Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
3. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
4. Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
5. Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	12
6. Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	12
7. Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	12
8. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	16
C. Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	17
1. Pengertian Kebijakan.....	17
2. Pengertian Penghapusan atau Pembebasan.....	18

3. Dasar Hukum Kebijakan Penghapusan atau Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Tahapan atau Prosedur Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	23
D. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	25
1. Gambaran Umum Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman	25
2. Profil Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman	29
3. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman	30
4. Struktur Organisasi Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman	33
5. Bidang-bidang, Tugas dan Fungsi di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	35
6. Sumber Daya Manusia Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman	37
7. Kode Etik Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman.....	37
8. Sarana dan Prasarana Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman	37
9. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ..	39

B. Hasi Penelitian dan Pembahasan	40
1. Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40
2. Strategi yang dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman untuk Penerapan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43
3. Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman	44
4. Upaya Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan adanya Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Januari – Juni 2023	4
Tabel 2.	Daftar PNS UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.....	34
Tabel 3.	Daftar PHL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.....	34
Tabel 4.	Target Dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Januari – Juni	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing- masing pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar pembangunan di daerah berjalan dengan lancar, maka setiap pemerintah daerah perlu memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Pendapatan daerah terdiri dari komponen – komponen penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, penerimaan dari dinas dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha- usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sebagaimana yang telah digunakan untuk membiayai pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah pajak daerah.

Kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana kebutuhan dana tersebut setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari,2019).

Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari kontribusi penerimaan pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berguna untuk mempermudah pengurusan administrasi kendaraan seperti bayar pajak, maupun perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB. Selain itu Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki manfaat bagi pemilik kendaraan yaitu meliputi kapasitas hukum, mencegah penyalahgunaan kendaraan, menjaga kepemilikan yang sah, memenuhi persyaratan administrasi, dan meningkatkan nilai jual kendaraan. Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memakan waktu antara 2 hingga 7 hari kerja.

Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh kantor bersama SAMSAT (Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap) atau *One Roof System*. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara

Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) yang secara terintegrasi dan berkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman.

Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya cenderung tidak stabil atau naik turun. Hal ini dibuktikan pada saat penulis melakukan kegiatan penelitian. Tidak maksimalnya penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman terjadi karena masih banyak terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor. Berikut ini adalah Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Januari– Juni 2023.

Tabel 1. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Januari– Juni 2023.

Periode / Bulan	Target	Realisasi
Januari 2023	124 Unit	51 Unit
Februari 2023	114 Unit	39 Unit
Maret 2023	124 Unit	47 Unit
April 2023	98 Unit	64 Unit
Mei 2023	130 Unit	63 Unit
Juni 2023	119 Unit	25 Unit

Sumber : Kantor UPTD PPD Sambar Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Tabel 1 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan pada masa kebijakan penghapusan BBKNB Samsat kabupaten Padang Pariaman dari Bulan Januari – Juni 2023 mengalami fluktuatif (Naik- Turun). Selama bulan Januari sampai Februari laporan realisasi Bea Balik Nma Kendaraan Bermotor mengalami penurunan, sehingga tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Beda halnya dengan bulan sebelumnya pada bulan Maret laporan realisasi mengalami kenaikan dari pada bulan sebelumnya, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada bulan April terjadi lagi kenaikan yang cukup besar dari pada bulan sebelumnya, tetapi masih belum dapat mencapai target. Pada saat bulan Mei sampai bulan Juni laporan realisasi mengalami penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Januari 2023 Sampai Juni 2023 mengalami naik turun. Hal ini dapat menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada peraturan Gubernur sebelumnya , yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan peraturan Gubernur tersebut, Kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Juni. Kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman optimal kerana penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor melebihi target yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan data awal penelitian, Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Bulan Januar –Juni 2023 belum mencapai target yang ditetapkan.

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas apakah kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh kepada wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka peneliti bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah yang akan di bahas penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi tentang tinjauan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman, serta diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan sumber referensi bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang sam